



SCIT bekerja di bawah Pengawasan dan Supervisi dari Kejaksaan Agung Timor-Leste

"Orang Timor adalah orang-orang yang akan memilih apakah mereka ingin menggunakan Keadilan Traditional atau tidak"

Konstitusi Timor Leste, Bagian ke 2, menyatakan bahwa Negara mengakui nilai-nilai norma dan kebiasaan Timor Leste yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan sebagian legislasi yang berurusan secara spesifik dengan hukum adat. Hingga saat ini tidak ada bekas hukum lama yang bekerja sama dengan hukum yang disebut hukum tradisional, namun, perdebatannya masih terbuka. Untuk memahami lebih lanjut mengenai hal itu, Informan SCIT telah berbicara dengan Lia nain, seorang tokoh tertinggi dalam sistem peradilan tradisional. Tuan Eugénio Sarmento, yang juga merupakan ketua Forum Lia nain, menjelaskan bagaimana sistem peradilan tradisional berkarya dan pandangannya agar bagaimana sistem peradilan ini bisa berintegrasi ke dalam sistem peradilan formal.

Bagaimana seseorang menjadi seorang Lia nain?

Ini adalah sebuah proses alamiah. Lia nain tidak dipilih melalui pemilihan. Ini adalah 'rumah suci' (Uma Lisan) yang menunjuk dia, karena saat ini Lia nain menerima suatu tanda ketika masa depan Lia nain lahir. Setelah menjadi seorang Lia nain yang benar, anak / pemuda harus mengunyah sirih yang ditawarkan kepadanya oleh Lia nain saat ini, kepala dari 'rumah suci' nya. Kemudian, jika tidak ada kadal bernyanyi dan tidak ada yang bersin, itu berarti jiwa-jiwa dari nenek moyang mengatakan bahwa ia akan menjadi Lia nain. Ini adalah suatu proses alami, bukan suatu proses politik.

Siapa dalam keluarga Anda yang mendahului Anda sebagai Lia nain?

Kakekku, kakek saya adalah seorang Lia nain yang hebat.

Mengapa anda dipilih di antara semua saudara-saudara Anda?

Seperti yang telah saya jelaskan, Lia nain bukan dipilih atau terpilih. Datang secara alami.

Namun, seseorang harus mengatakan bahwa siapakah Lia nain yang baru ...

Ada tanda-tanda. Sebagai contoh, suku saya, kita berasal dari Ular, jadi Totem kami memiliki seekor ular dan kami selalu menghormati Ular itu. Jadi, ketika aku masih sangat muda, selalu ada banyak ular di sekitar dan ini adalah suatu tanda bahwa saya adalah seorang Lia nain.

Apakah tanggung jawab utama dari seorang Lian nain?

Tanggung jawab utama dari Lia nain adalah untuk berdoa kepada Tuhan agar menyelesaikan konflik menurut hukum adat, misalnya, kesalahpahaman antara pengantin pria dan keluarga, sengketa kepemilikan, dll. Selain itu, Lia nain juga merupakan bagian dari sistem administrasi Negara ini, Karena Lia nain juga membuat keputusan-keputusan, seperti, misalnya, untuk menyatakan perang, atau tentang penunjukan atau memecat seorang Liurai, dalam hal ia gagal untuk melayani orang dengan baik. Hal ini karena Lian nain adalah juru bicara dari suku, rumah suci, dan tidak bergantung pada kerajaan.

Berapa tahun Anda telah berperan sebagai Lia nain?

Seperti yang telah saya jelaskan, oleh alam, sejak awal, sejak saya masih sangat kecil; ketika seseorang adalah seorang Lia nain, ia selalu merupakan seorang Lian nain. Ini adalah ketika rumah suci dibangun, bagaimanapun, bahwa setiap orang secara otomatis menjadi sadar bahwa kita adalah Lia nain.

Kapan Anda mulai menyelesaikan konflik-konflik?



Kami membangun/mendirikan rumah suci kami pada tahun 2007. Saya sudah Lia nain sebelum itu.

Dan bagaimana proses penyelesaian konflik ini?

Kami punya 4 tingkatan yang berbeda untuk resolusi konflik. Tingkat pertama adalah di rumah. Anggota tertua dari suatu keluarga bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam keluarga tersebut. Jika tidak dapat melakukannya, kasus tersebut diserahkan kepada Kepala Desa. Jika Kepala Desa tidak dapat menyelesaikannya, maka kasus tersebut diserahkan ke Kepala Suco. Jika Kepala Suco tidak sanggup, maka kasus itu menjadi tanggung jawab dari Liurai. Namun, Liurai bukan 'pengadilan' tertinggi. Dalam sistem tradisional, 'pengadilan banding', yang paling penting dari semuanya adalah kumpulan Lia nain. Kumpulan Lian nain menggunakan gaib setiap kali bertemu untuk menyelesaikan suatu kasus. Kasus ini tidak diselesaikan melalui logika, melainkan melalui gaib. Ini yang sistem positivisme hukum gagal untuk menerima. Karena, ketika sistem gaib digunakan, system gaib ini adalah untuk menentukan siapa yang bertindak tidak benar dan yang bertindak dengan baik. Ketika hal-hal ini berjalan sejauh ini 'pengadilan banding', orang sadar bahwa ia melakukan kejahatan atau dosa dan akan menolak untuk ambil bagian dalam ritual, dan akan kehilangan jika dia bersikeras

"Lian nain harus menjadi independen dan adil, jika tidak mereka akan mati"

untuk mengambil lebih lanjut.

Bagaimana 'pengadilan banding' ajaib ini bekerja?

Ritual dimulai pukul 7 am, ketika ayam jantan dan ayam betina naik pohon. Lia nain mulai dengan mencampur beras dan kapur mineral. Beras mewakili tanah, karena tanah suci. Kapur mewakili api dan air karena untuk membuat kapur, Anda harus menggunakan api dan menambahkan air. Kemudian Lia nain mulai berdoa kepada Allah mereka: "Anda dapat melihat tanah suci lebih jelas daripada yang kita bisa. Kami berada dalam kegelapan. Oh tanah suci, ungkapkan untuk menggunakan jalan untuk menemukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah'. Api akan memberikan cahaya dan air akan mengungkapkan. Selanjutnya, Lia nain menawarkan kapur dan sirih baik kepada korban dan tersangka. Mereka mulai mengunyah

Editorial:

Pada edisi ke-5 info SCIT kami senang untuk melaporkan perkembangan yang besar dalam hal reparasi bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu di Timor-Leste: Parlemen menyetujui suatu resolusi yang membuka jalan untuk pembentukan suatu lembaga baru yang akan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi dari CAVR dan KKP. Lembaga baru tidak hanya akan membuat program reparasi tetapi juga mencoba untuk mengatasi masalah orang-orang hilang. Selain itu kami memberikan pemberitahuan tentang "Penilaian Kebutuhan Independen," laporan tentang Sistem Keadilan Timor-Leste, dirilis Oktober lalu. Akhirnya kami menawarkan suatu potret sistem peradilan tradisional, melalui suara Lia nain Eugénio Sarmento dan jawaban-jawaban atas beberapa pertanyaan yang sering diajukan tentang proses Pidana kejahatan yang berat.

Marek Michon
Head of SCIT



"Lia nain bukan dipilih atau terpilih. Datang secara alami."

dan keduanya memiliki rasa bersalah, mulut mereka akan mulai berdarah secara bersamaan. Jika salah satu dari mereka adalah jujur dan tidak bersalah, mulut orang itu tidak akan berdarah, juga ia tidak akan batuk. Di sisi lain, orang yang bersalah akan muntah darah dan jatuh ke tanah. Bahkan kemudian, orang tersebut menolak untuk mengakui kesalahannya, dapat berakibat kematian, karena ini sangat berbahaya.

Jenis tipe kasus-kasus apa yang diselesaikan melalui ritual ini?

Segala macam. Pencurian, pemberontakan dan bahkan membunuh, ini adalah tradisi kami. Kasus pembunuhan, bagaimanapun, adalah berbeda. Kalau saya membunuh seseorang, saya tidak bisa membayarnya dengan seekor kerbau atau harta benda. Barangsiapa yang membunuh seseorang harus membayar dengan seseorang. Baik seorang putra atau seorang saudara.

Apakah tradisi ini masih dipraktikkan?

Ya, masih.

Sekarang, walaupun, Timor-Leste mempunyai sistem peradilan formal. Jika dipanggil untuk menyelesaikan suatu kasus, apa yang Anda lakukan?

Kita sekarang hidup di zaman moderen. Saya mengirim kasus-kasus ini ke pengadilan. Jarang ritual ini dilakukan yang saya sebut ' pengadilan banding tradisional ' karena pengadilan ini sangat mahal, itu melibatkan banyak biaya-biaya. Pihak yang bersalah harus membunuh seekor kerbau. Kerbau disebut 'cornobado', yang berarti: tanda hukum adat dan ketertiban. Jadi, semua orang yang menghadiri 'pemeriksaan' ini harus makan semua daging kerbau. Barangsiapa makan daging ini sekali ia tidak dapat berpartisipasi lagi dalam 'percobaan' atau akan harus membayar dua kali lipat.

Bagaimana Anda melihat masa depan integrasi sistem peradilan formal dengan sistem peradilan tradisional?

Pertama, sebuah studi perlu dilakukan untuk melihat apakah keuntungan dan kerugian dari integrasi kedua system ini dan kekhasan dari masing-masing daerah. Karena masing-masing kelompok etno-linguistik

memiliki suatu sistem yang berbeda. Saya hanya bisa berbicara tentang sistem dari desa saya.

Dalam kasus sistem peradilan tradisional dari kelompok etnis Anda, bagaimana mungkin hal itu berintegrasi dengan System Peradilan Formal?

Masalahnya adalah dengan modernisasi, globalisasi, komunikasi, dan sebagainya, orang, dan terutama kaum muda, budaya tidak lagi dianggap penting dan ini termasuk hukum tradisional/adat. Ini adalah masalah tersebut. Jika mereka tidak suka, bagaimana kita dapat memiliki sarana untuk menyelesaikan konflik-konflik?

Jadi, orang-orang akan harus memilih ...

Ya.

Apa pendapat Anda tentang sistem peradilan formal?

Sistem peradilan formal itu baik, tapi masalahnya adalah bahwa siapa pun yang memiliki uang paling banyak bisa menang. Ini tidak dapat terjadi.

Dalam sistem tradisional, apakah Lia nain juga harus mandiri?

Lian nain harus independen dan adil, jika tidak mereka akan mati. Mereka adalah yang pertama makan campuran tersebut. Ada perbedaan, namun, dalam sistem peradilan tradisional. Lia nain hanya dapat melaksanakan keadilan dalam kelompok etno-linguistik dirinya sendiri. Setidaknya, meskipun beberapa hal dapat diatasi, jadi tidak semuanya harus pergi ke pengadilan.

Dapatkah perempuan menjadi Lia nain?

Di sini, di Timor, hanya ada satu kelompok etno-linguistik di mana perempuan dapat menjadi Lia nain, mereka adalah Naueti, dari wilayah Uatucarbau, Uatulari ... Mereka disebut Nain Feto.

Apakah Anda berpikir bahwa sistem peradilan tradisional bisa menangani kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang dilakukan di Timor-Leste antara tahun 1975 dan 1999?

Sistem tradisional dapat menyelesaikan segala jenis masalah, termasuk masalah tahun 1975, secara langsung akan ke keadilan gaib. Bukan melalui logika manusia, melainkan melalui roh. Roh tidak dapat berbohong kepada kita.

Laporan 'Sebuah Independen dan pengetahuan umum memerlukan penilaian' dirilis pada Oktober 2009

Para hakim internasional telah mengevaluasi Sistem Peradilan Timor Leste

Sekelompok dari empat hakim internasional dan para ahli hukum dari Amerika Serikat, Portugal dan Kazakhstan, termasuk mantan Kepala Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, Hakim Philip Rapoza, datang ke Timor-Leste pada bulan Agustus dan September untuk mengevaluasi sistem peradilan Timor Leste. Misi ini dikirim oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berkonsultasi dengan Pemerintah Timor, sesuai Laporan Sekretaris-Jenderal (S/2006/628) tahun 2006 dan resolusi Dewan Keamanan 1867.

Untuk laporan ini, para ahli 'panel telah mewawancarai 140 orang di Timor-Leste, baik orang Timor dan internasional, termasuk para pemimpin negara.

Para ahli menyampaikan laporan mereka pada 13 Oktober 2009 yang menyimpulkan bahwa suatu kemajuan yang signifikan telah dicapai karena dedikasi orang yang bekerja dalam sistem peradilan. Namun laporan tersebut juga menunjukkan bahwa masih banyak kebutuhan dan tantangan yang tersisa.

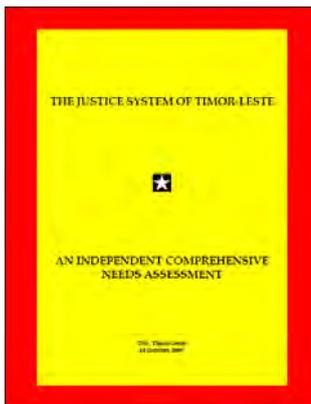
Salah satu tantangan utama adalah berkaitan dengan independensi peradilan. Dalam laporan mereka para pakar menyatakan bahwa meskipun hakim orang Timor dipercayai dalam posisi mereka, "kemerdekaan institusional lembaga peradilan masih belum sepenuhnya diakui oleh

aktor-aktor negara lain".

Dalam kaitan dengan akuntabilitas untuk Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan kejahatan berat lainnya, para ahli merekomendasikan bahwa Timor Investigasi Kejahatan Berat (SCIT) harus terus berfungsi, dan diberi sumber yang diperlukan, sampai tim tersebut melengkapi semua kasus ditahun 1999. Selain itu, laporan tersebut merekomendasikan bahwa PBB dan masyarakat internasional harus memberi penjelasan kepada pihak berwenang Timor-Leste bahwa tim SCIT akan mendukung proses membawa mereka yang bertanggungjawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia berat dimasa lalu ke pengadilan.

Laporan ini juga menggarisbawahi akan kebutuhan untuk mengembangkan suatu "hukum Tetum", kebutuhan tersebut untuk meningkatkan jumlah hakim dan meluaskan kehadiran pembela publik di daerah-daerah serta meningkatkan perlunya koordinasi antara petugas-petugas PNTL dan Jaksa-jaksa. Para ahli mengucapkan selamat kepada Timor-Leste dalam pengembangan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan menyerukan pembangunan mendesak mengenai sebuah 'kode anak-anak'.

Dalam kaitannya dengan pengadilan tradisional, para ahli merekomendasikan bahwa "sistem Hukum Adat harus diselaraskan dengan sistem peradilan formal dan tidak berjalan sejajar".



Cover of the report on the Justice System of Timor-Leste

LSM Baucau, CTI, mengambil penyebaran laporan 'Chega' untuk semua kecamatan

"Kami ingin keduanya rekonsiliasi dan keadilan"

Selama bulan September dan Oktober, semua sub-distrik Baucau telah menyelenggarakan pertemuan masyarakat tentang rekomendasi dari Laporan 'Chega'. Masyarakat di sub-distrik menerima inisiatif dengan antusiasme dan semangat kritis, menggarisbawahi kebutuhan untuk reparasi dan menekankan mereka menginginkan keduanya "rekonsiliasi dan keadilan". Kegiatan ini diselenggarakan oleh Institusi Komunitas Transformasi (CTI), sebuah LSM lokal yang juga mengundang Sekretaris Post-CAVR, Assosiasi Hak, Tim Investigasi Kejahatan Berat (SCIT) dan Hak Asasi Manusia dan Unit Keadilan Transisional (HRTJ) dari UNMIT.

Pertemuan itu diadakan di Quelicai, Loilubo, Bucoli, Venilale, Laga dan Baucau, dan memiliki rata-rata 60 peserta. Para pembicara meninjau rekomendasi-rekomendasi yang paling signifikan yang dibuat oleh CAVR, dianalisis rekomendasi-rekomendasi tersebut dalam terang fundamental Universal Hak Asasi Manusia dan memberitahu masyarakat tentang apa yang telah dilakukan dalam hal pelaksanaan rekomendasi utama. Mr Clemens Loos dari HRTJ / UNMIT menjelaskan bahwa beberapa dari rekomendasi tersebut telah dilaksanakan, seperti pembentukan KUHP baru dan UU Perlindungan Saksi.

Para peserta, beberapa dari mereka membawa jejak Konstitusi Timor-Leste, menekankan perlunya reparasi yang paling rentan dan mengangkat isu-isu penting seperti: "yang dianggap sebagai korban?" Dan "mengapa pelaku-pelaku tidak dibawa ke pengadilan?". Rekomendasi yang dibuat oleh CAVR tentang pendirian Pengadilan Internasional untuk berurusan dengan pelanggaran hak asasi manusia serius dari 74-99 juga merupakan salah satu yang paling diperdebatkan di setiap sub-distrik. Mr Saturnino, di Loilubo menjelaskan alasannya: "karena kita ingin rekonsiliasi tetapi sebelumnya keadilan harus ada. PBB harus mendirikan pengadilan internasional". Di Quelicai, sub-distrik administrator meminta pejabat UNMIT untuk "membantu orang Timor berjuang untuk suatu Pengadilan Internasional".

Di Baucau, Mr Dionisio Babo mantan komisaris KKP berpartisipasi dalam rapat. Dia menjelaskan bahwa salah satu prestasi terbesar dari komisi tersebut adalah pengakuan oleh Pemerintah Indonesia bahwa mereka bertanggung jawab atas kekerasan tahun 1999. Para peserta menyatakan kepuasannya dengan karya kedua CAVR dan KKP, tetapi bagi sebagian orang, seperti Mr Saturnino dan Mr Francisco Da Costa menegaskan



bahwa "jika tidak ada proses hukum seperti Indonesia tidak pernah melakukan kejahatan apa pun selama invasi ke Timor-Leste".

Jika pendapat dibagi dalam kaitannya dengan masalah keadilan, ada konsensus luas di antara peserta dari rapat ini tentang keinginan mereka untuk didengarkan: "Para pemimpin dan PBB harus mendengarkan kami, orang-orang tersebut", kata Mr Ximenes di Laga.

CTI berencana untuk memperluas inisiatif ke distrik Viqueque mulai bulan Januari 2010.



"Menyampirkan politik, keadilan harus diimplementasikan sesuai jalannya", eks-pejuang, Baucau

Lembaga baru untuk mengawasi reparasi kepada korban akan dibentuk

Parlemen menahkan resolusi tentang pelaksanaan rekomendasi CAVR dan KKP

Pada 14 Desember 2009, Parlemen Timor-Leste telah menyetujui suatu resolusi yang menetapkan pedoman pelaksanaan rekomendasi Komisi Resepsi, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) dan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Resolusi yang akan didefinisikan secara hukum oleh parlemen, mengarah ke "pendirian sebuah lembaga baru" yang akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut. Lembaga baru akan dibiayai oleh pemerintah dan akan merespon ke Parlemen. Mandatnya untuk melaku-

kukan program-program di lima bidang: dokumentasi dan penelitian (memiliki hak asuh atas arsip-arsip CAVR); reparasi kepada korban pelanggaran HAM masa lalu dan memorialisasi; sosialisasi, pendidikan dan pelatihan; penghilangan dan orang hilang, dan pelaporan.

Menurut resolusi, program reparasi akan menargetkan pelanggaran hak asasi manusia kepada korban yang paling rentan yang dilakukan antara 1974-1999 "yang terus menderita sebagai akibat dari pelang-

garan, yang mengidentifikasi diri sebagai korban dan yang belum manfaat dari lain Program Pemerintah relevan". Ini akan melibatkan pendaftaran korban-korban, di antara kegiatan-kegiatan lain. Mengenai program tentang orang hilang, lembaga baru akan "menambah nilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh organisasi-organisasi seperti Komite 12 November dan Komite Internasional Palang Merah". Program ini akan mencakup pembentukan sebuah registri yang hilang atau

menghilang tegas dan bertujuan untuk mendapatkan kerjasama dari Indonesia. Resolusi datang sebagai suatu hasil dari pertemuan Dialog Konsensus Nasional yang dilaksanakan pada bulan Juli dan September 2009, disahkan oleh Presiden, dengan dukungan dari beberapa LSM nasional dan internasional dan Hak Asasi Manusia dan Keadilan Transisional Unit UNMIT. Tidak ada konsensus yang belum tercapai sehubungan dengan masalah keadilan.



UNMIT/Serious Crimes Investigation Team (SCIT) newsletter • issue 5 • Desember 2009

SCIT-UNMIT
Obrigado Barracks II
Caicoli
DILI

Phone: 330-4100
Fax: 330-4110

UNMIT Regional Support Centres
BAUCAU: Vila Nova
MALIANA: Holsa Soso
SUAI: Next to the Heliport

Untuk dapat memperoleh informasi selengkapnya, silakan hubungi:
Júlia Galvão Alinho
External Relations Officer
Mob: +670 73 11 519
E-mail: alinho@un.org

Investigasi 1999 untuk Membantu Membawa Keadilan di Timor-Leste

WWW.UNMIT.ORG/RULE OF LAW/SERIOUS CRIMES

Singkat kata...

- **Dewan Keamanan PBB-pertemuan mengenai TL pada bulan Februari** Dewan akan memutuskan apakah UNMIT akan tetap mempertahankan kekuatannya saat ini atau harus dirampingkan/dikurangi dan / atau diperkuat di beberapa daerah.
- **Dialog Konsensus Nasional Bagian II pada bulan April** Para pemimpin Timor-Leste akan berkumpul kembali pada bulan April untuk memperdebatkan masalah keadilan bagi pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.
- **Korban Nasional** Asosiasi menyetujui undang-undang tersebut. Para wakil korban dari semua distrik akan berkumpul lagi sekitar bulan April 2010 untuk menyetujui undang-undang asosiasi mereka, 'Martires da Patria'

Siapa yang memiliki yurisdiksi mengenai kejahatan melawan kemanusiaan do Timor-leste?

Apakah Kejahatan Terhadap Kemanusiaan?

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, seperti yang telah dijelaskan dalam Statuta Roma dan di Timor KUHP (Pasal 124) adalah **kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang luas atau sistematis terhadap penduduk sipil**, seperti kejahatan: pembunuhan, pembasmian, perbudakan, deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa; penjara atau perampasan kebebasan; penyiksaan; perkosaan, kekerasan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau segala bentuk kekerasan seksual yang gravitasi sebanding; penganiayaan; paksa dari orang-orang/hilangnya orang-orang yang dipaksa; apartheid; tindakan lain yang tidak manusiawi dari karakter yang serupa sengaja menyebabkan penderitaan yang hebat, atau luka-luka berat di tubuh atau di mental atau kesehatan fisik.

Siapa yang memiliki kekuasaan untuk menyelidiki Kejahatan Berat dari tahun 1974-1999?

Menurut konstitusi Timor, Pasal 160 °: "Kisah yang dilakukan antara tanggal 25 April 1974 dan 31 Desember 1999 yang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida atau dari perang akan dikenakan pidana dengan pengadilan nasional atau internasional". Ini berarti bahwa baik polisi nasional maupun internasional / penyidik bisa menyelidiki kejahatan-kejahatan tersebut.

Saat ini di Timor-Leste, Kantor Kejaksaan dan PNTL memiliki kekuatan untuk menyelidiki Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dilakukan kapan saja di masa lalu. Untuk melengkapi penyelidikan terhadap kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999, pihak berwenang Timor-Leste telah menandatangani perjanjian dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan mandat kepada Tim Investigasi Kejahatan Berat untuk menyelesaikan investigasi tersebut, yang mana telah diprakarsai oleh eks unit Kejahatan Berat. SCIT bekerja di bawah arahan dari Kantor Jaksa Agung.

Siapa Yang memiliki kompetensi untuk membawa kasus-kasus tersebut ke pengadilan?

Setelah penyelidikan selesai, hanya Kantor Jaksa Agung yang memiliki kompetensi untuk memutuskan apakah kasus tersebut harus ditutup atau jika ada cukup bukti untuk mengirimkannya ke pengadilan, yaitu untuk mengajukan sebuah surat dakwaan dengan pengadilan.

Pengadilan mana yang mempunyai yurisdiksi atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor-Leste?

Tampaknya bahwa berdasarkan Pasal 3 dari Hukum Acara Pidana Timor-Leste **semua ketentuan yang mengatur kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan berat yang dilakukan antara 1 Januari dan 25 Oktober 1999 tetap berlaku** (sub-pasal 9.1, 9.2 dan 9.4 Regulasi UNTAET No 2000 / 11 dan Peraturan UNTAET No 2000/15).

Ini berarti, dalam interpretasi yang luas dari Undang-undang, bahwa di Timor-Leste semua Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Genosida dan Kejahatan Perang yang dilakukan kapan saja di masa lalu, termasuk 1999, jatuh di bawah **yurisdiksi eksklusif dari Pengadilan Distrik Dili** dan harus didengar oleh seorang hakim panel yang terdiri dari dua hakim internasional dan 1 hakim nasional. Pembunuhan, Pelanggaran Seksual dan Penyiksaan yang tidak merupakan Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Genosida atau Kejahatan Perang yang dilakukan pada tahun 1999 akan menjadi yurisdiksi yang eksklusif dari Pengadilan Distrik Dili, kejahatan yang dilakukan saat yang sama pada tahun 1974 dan 1998 tidak akan dan karenanya akan dapat didengar oleh seorang hakim panel sebelum Pengadilan Negeri di mana pelanggaran itu dilakukan.

Jika seseorang yang didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, ada surat perintah penangkapan terhadap dirinya, kembali ke Timor-Leste, bagaimana prosedurnya?

Jika orang yang melakukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan sudah didakwa, ini berarti bahwa ada file di pengadilan dengan bukti terhadap dia dan sebuah surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Dalam hal ini, jika polisi (PNTL atau UNPOL tergantung pada distrik) mengetahui bahwa orang itu telah kembali, dapat segera menangkapnya dan membawanya ke Jaksa Penuntut Umum yang kemudian akan menghadirkannya pada seorang hakim. Hakim tersebut akan memutuskan apakah orang tersebut dapat menunggu untuk diadili hidup dalam kebebasan, atau jika ia harus tetap pada penahanan pra-sidang.

Pengadilan mana yang dapat memutuskan penahanan pra-peradilan untuk seseorang yang dituntut dengan kejahatan berat?

Sebagaimana telah kita lihat, undang-undang saat ini menyatakan bahwa Pengadilan Distrik Dili mempunyai yurisdiksi eksklusif atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang yang telah dilakukan disetiap saat dan Pembunuhan, Pelanggaran Seksual dan Penyiksaan yang dilakukan pada tahun 1999. Namun, Hukum Acara Pidana Timor-Leste Pasal 30 dan 31 - menyatakan bahwa keputusan oleh pengadilan lain yang tidak mempunyai yurisdiksi, dibuat untuk alasan-alasan yang mendesak, akan dianggap sah.